

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi di suatu Negara memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas atau taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kesejahteraan masyarakat di dalam suatu Negara dapat dilihat dari kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah juga bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian suatu wilayah dalam keadaan baik. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka menggambarkan bahwa perekonomian dalam keadaan yang tidak baik. Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah, apabila tidak diimbangi dengan pemerataan maka akan mengakibatkan ketimpangan daerah tersebut semakin tinggi.

Pembangunan ekonomi memiliki arti yang luas dari konsep pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2004), pembangunan ekonomi yaitu suatu kenyataan serta tekad masyarakat yang berbentuk fisik untuk berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan kombinasi proses ekonomi, sosial, dan institusional demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan untuk kehidupan yang lebih baik. Menurut Sukirno (2013), pembangunan ekonomi akan tercapai apabila pendapatan per kapita masyarakat terus bertambah pada tingkat yang cepat.

Menurut Prawoto (2014) pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan dari produk nasional bruto. Arsyad (2010) mengatakan ekonomi tumbuh ditandai dengan naiknya Gross Domestic Product (GDP) maupun Gross National Product (GNP) baik itu kenaikannya lebih besar maupun lebih kecil dari rasio pertumbuhan penduduk serta tidak melihat apakah terjadi perubahan dari pola ekonomi atau tidak. Prawoto dan Basuki (2004), menyatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Menurut Sukirno (2005) pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dalam hal laju pertumbuhan ekonomi antar daerah dan daerah lainnya terdapat perbedaan. Ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Sukirno (2005) ada 4 hal yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pemikiran ini didasari pada pandangan ekonom klasik dan neo klasik, yaitu, tanah serta kekayaan 4 alam, penduduk dan tenaga kerja serta kualitas dari penduduk, ketersediaan barang modal serta teknologi yang digunakan

Adanya *trade off* antara laju pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan mengakibatkan masalah ketimpangan ekonomi sulit untuk diatasi. Karena pembangunan ekonomi memiliki konsep yang luas yaitu pada kualitas pembangunan yang dilakukan dan diikuti dengan masalah-masalah lainnya seperti

kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan serta struktural yang tidak seimbang. Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah, apabila tidak diimbangi dengan pemerataan maka akan mengakibatkan ketimpangan daerah tersebut semakin tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan permasalahan penting di suatu wilayah yang harus segera diatasi karena ketimpangan pendapatan dampaknya bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial.

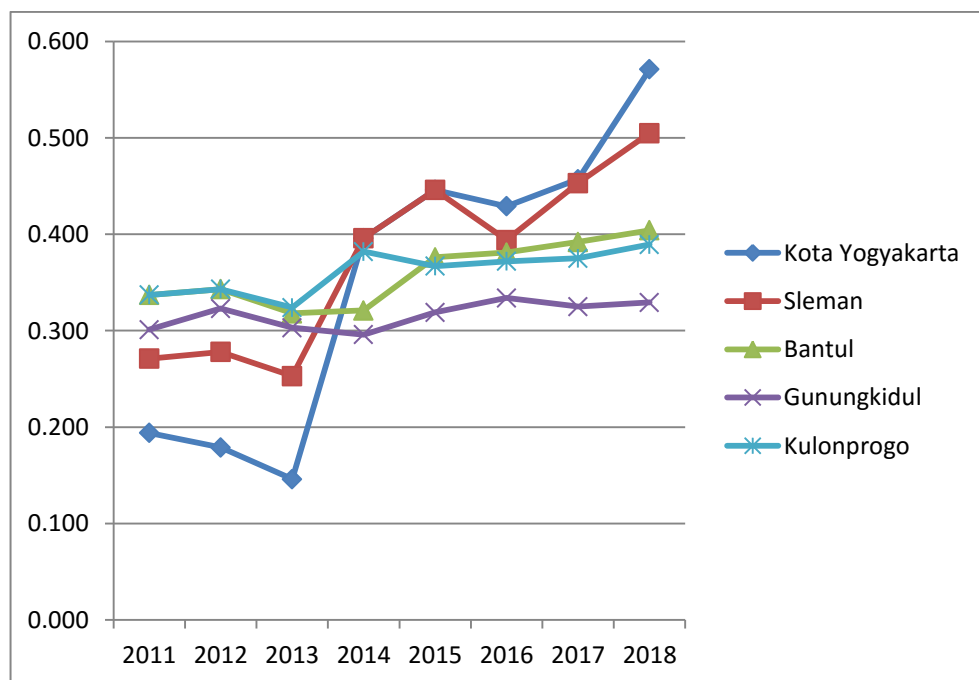
Hartini (2017) menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Namun bukan hanya dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keberhasilan pembangunan dapat dilihat melalui keberhasilan indikator lain yaitu indikator sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni pada meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan dan kemudahan untuk mengakses suatu informasi.

Pengertian PDRB menurut BPS yaitu nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi melalui unit-unit ekonomi dan waktu tertentu. Sementara itu, hasil dari kegiatan ekonomi melalui unit-unit ekonomi kemudian dibagi jumlah penduduk wilayah tertentu kemudian menghasilkan PDRB per kapita. Kegiatan ekonomi tersebut disumbang oleh sembilan sektor yaitu pertanian, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, listrik dan gas serta air bersih, bangunan, restoran dan hotel, komunikasi dan pengangkutan, penyewaan dan keuangan serta jasa perusahaan dan jasa-jasa

Menurut Aldeman dan Morris (dalam Arsyad, 1999: 226), ada delapan hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang yakni penambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan penambahan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, Investasi yang banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar (*term off trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Menurut Taharah (2018), PDRB Perkapita juga menjadi salah satu indikator untuk mengetahui bagaimana kondisi disuatu wilayah dalam periode tertentu, dapat di lihat dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konsta atau atas harga berlaku. Jika pendapatan perkapita mengalami peningkatan, otomatis akan mendorong naiknya tingkat daya beli atau konsumsi masyarakat. Ketika daya beli atau konsumsi masyarakat meningkat otomatis juga akan mendorong meningkatnya produksi barang dan jasa.

Secara riil atau atas dasar harga konstan 2010, PDRB per kapita meningkat dari Rp18,65 juta di tahun 2010 menjadi Rp25,78 juta di tahun 2018 atau rata-rata tumbuh 4,13 persen per tahun. Secara kasar, peningkatan level tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata yang semakin membaik dengan asumsi faktor produksi yang menggerakkan perekonomian dimiliki oleh penduduk/residen DIY. Pertumbuhan PDRB per kapita riil memiliki pola yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, level pertumbuhan PDRB per kapita riil tercatat lebih rendah karena dikoreksi oleh laju pertumbuhan penduduk DIY setiap tahun.



Sumber : Data Diolah , 2019

**GAMBAR 1.1**  
Indeks Gini Kabupaten/ Kota DIY

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan tersebut yaitu menggunakan Indeks Gini yang memiliki nilai 0 sampai dengan 1. Rasio gini kecil lebih kecil dari 0,4 menunjukkan ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Untuk melihat nilai rasio gini di provinsi D.I Yogyakarta berdasarkan pada kurun waktu 2011-2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Gini pada tahun 2018, Kabupaten Kota Yogyakarta menempati angka Indeks Gini paling tinggi diantara 5 Kabupaten/Kota lainnya. Pada tahun 2018 indeks gini provinsi D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan paling tinggi di Indonesia. Tingkat kesenjangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin tinggi. Bahkan kesenjangan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini berada di atas angka nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angka gini ratio provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 0,442, sedangkan nasional 0,391. Melihat cukup besar dampak yang ditimbulkan akibat ketimpangan distribusi pendapatan, maka diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ketimpangan pendapatan di provinsi D.I Yogyakarta.

Masalah ketimpangan ekonomi juga ada pada Ayat Al-Hasyr : 7 yang menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi dilarang oleh Allah SWT.

وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي ٱللرَّسُولِ فَلَئِنَّ الْفُرَىٰ أَهْلٍ مِّن رَّسُولِهِ عَلَىٰ ٱللَّهِ أَفَاءَ مَا  
الرَّسُولُ ٱتَّكَمُ وَمَا ۖ مِنْكُمْ ٱلْأَغْنِيَاءُ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَٱبْنِ وَٱلْمَسَاكِينِ  
شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٱللَّهُ إِنَّ ۖ ٱللَّهِ وَٱتَّقُوا ۖ فَٱنْتَهُوا عَنْهُ نَهَٱكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ

Artinya : “*Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu sekalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amatkeras hukumannya*”

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan harus merata, tidak hanya beredar diantara orang-orang yang kaya , namun juga untuk orang miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Sismosoemarto (2012) mengungkapkan bahwa akibat adanya masalah ini adalah munculnya kecemburuan sosial, ketegangan, dan terus memicu kesenjangan. Sehingga masyarakat mengalami frustasi sosial yang kemudian berujung pada tindak kriminal atau kekerasan lainnya. Adapun ketimpangan pendapatan regional merupakan ketimpangan perkembangan ekonomi antar berbagai daerah pada suatu wilayah yang kemudian menyebabkan ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah melihat pentingnya masalah Indeks Gini , maka diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi D.I Yogyakarta. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang semakin parah, maka pemerintah daerah harus

memperhatikan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengambil judul dalam penelitian tentang, **“Determinan Ketimpangan Ekonomi antar Kabupaten di provinsi D.I Yogyakarta”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Indeks Gini di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Gini di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Gini di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Gini di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Indeks Gini di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Gini di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Gini di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Gini di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak -pihak lain yang berkepentingan, yaitu bagi:

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Yogyakarta. Selain itu dari penelitian ini diharapkan penulis dapat mengerti faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan, memperluas dan

memantapkan wawasan serta ketrampilan yang dapat membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

3. Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan ekonomi pada suatu daerah.

